

**PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2010**
(Studi Kasus di Kecamatan Sungai Teblian Kabupaten Sintang)

*Implementation of Voting on Local General Election at Sintang Regency of 2010
(Case Study in Teblian District – Sintang Regency)*

Syekh Mochsin¹, Syamsuni Arman², Ori Fahrianyah³

Program Studi Ilmu Politik
Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan penghitungan suara ulang pilkada tahun 2010 Kabupaten Sintang, dengan fokus, Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010 dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penghitungan suara ulang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang Pilkada Tahun 2010 Kabupaten Sintang, dalam Rapat Pleno yang dilaksanakan disekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang melakukan penyandingan Formulir Model C1-KWK, antara Formulir yang menjadi barang bukti di Mahkamah Konstitusi dengan yang dimiliki oleh Panwaslukada dan Formulir Model C1-KWK yang dimiliki PPK (yaitu DA-A-KWK) dan memutuskan bahwa adanya indikasi pemalsuan Formulir Model C1-KWK. Namun demikian pasangan calon nomor 4 merasa keberatan dan tidak setuju, KPU Kabupaten Sintang tetap melanjutkan Rapat Pleno. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, misalnya dengan mendatangkan para ahli untuk memperkuat pernyataan KPU Kabupaten Sintang dan juga harus ada surat penegasan dari pihak Kepolisian karena berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan, maka akan terkesan tidak Demokratis dan KPU Kabupaten Sintang berlaku memihak salah satu pasangan calon (tidak netral). Rendahnya tingkat netralitas dan demokratis disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Diantara faktor-faktor internal yang berperan adalah rendahnya sumberdaya manusia dan tekanan dari elite politik juga kurangnya maksud baik dari KPU Kabupaten Sintang itu sendiri, sedangkan faktor eksternal mencakupi lemahnya pengawasan dari pihak keamanan, kurangnya produk perundang-undangan yang mendukung. Agar terwujud demokratisasi dan netralitas, KPU Kabupaten Sintang harus memiliki kemampuan intelektualitas dan komitmen yang kuat serta kredibilitas untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur dan bertanggung jawab.

Kata kunci : Pelaksanaan pemilihan, Kepala Daerah.

PENDAHULUAN

¹ Swasta

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum secara langsung yang dilaksanakan di Kabupaten Sintang memang telah selesai dilaksanakan, bahkan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah dipilih dan ditetapkan, roda pemerintahanpun telah berjalan dengan aman dan damai. Namun dalam pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan di Kabupaten Sintang mengalami sedikit permasalahan, masalah ini sampai berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Dengan permasalahan yang terjadi ini semakin membuat penulis heran, karna persoalan tersebut terjadi ditengah pengawasan dan pengamanan yang amat ketat dan bahkan tak mungkin ada yang berani melakukan kecurangan.

Permasalahan kecurangan yang terjadi dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Sintang diantaranya, terdapatnya perbedaan data jumlah suara salah satu pasangan calon bupati yang bertarung dalam pemilukada Kabupaten Sintang, perbedaan itu terjadi antara data yang ada di panitia pemilihan kecamatan (PPK) dengan data yang ada ditempat pemilihan suara (TPS), seperti di daerah kecamatan sungai teblan tepatnya didelapan desa yang berada dalam wilayah kecamatan sungai teblan, namun didelapan desa tersebut terdapat sebelas tempat pemilihan suara, tentu saja banyak terdapat suara- suara pemilih yang sah. Kecamatan sungai teblan memiliki dua puluh satu desa atau panitia pemilihan suara, dengan jumlah tempat pemilihan suara ada enam puluh enam. Letak kecamatan sungai teblan yang tidak begitu jauh dari kota Kabupaten dan sudah tentu bentuk keamannyapun akan lebih tepat dan cepat, namun apa yang terjadi dibalik ketatnya pengamanan dan letaknya yang tidak begitu jauh dari kota sintang, ternyata ada pelanggaran pemilukada. Pelanggaran pemilukada tidak seharusnya terjadi karna dalam kegiatan Penyaluran kotak dan surat suara tersebut dikawal oleh pihak keamanan dan bahkan pada saat penyimpanan kotak dan surat suara tersebut dijaga oleh pihak keamanan dua puluh empat jam dengan bergantian jaga, penyimpanan kotak dan surat suara tersebut dilakukan oleh pegawai Komisi Pemilihan Umum di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan setempat. Pelanggaran dalam pemilihan umum yang berlangsung tersebut, diperparah lagi dengan perlakuan oleh anggota tempat pemilihan suara, yang melakukan pencoblosan dengan berulang-ulang, namun hanya dilakukan oleh satu orang dan yang lebih mengherankan lagi kejadian ini dilakukan ditengah berlangsungnya acara pemilihan umum, disaksikan oleh banyak pasangan mata termasuk panitia pengawas pemilu, ada wakil dari pasangan calon dan bahkan para saksi-saksi dari masyarakat dan independent.

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan di Sintang semestinya tidak mengalami penghitungan suara ulang, jauh-jauh hari telah diantisipasi dengan penjagaan yang amat ketat yang dilakukan oleh pihak Keamanan baik Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Hansip di tiap-tiap tempat pemilihan suara dan dari pihak panitia pengawas pemilu setempat, kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu ada tim pemantau independen, namun perwakilan dari masing-masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tak mampu berbuat banyak. Pelaksanaan pengamanannya mulai dilakukan dari pencetakan surat suara sampai pengiriman dan bahkan penyimpanan surat suara di gudang-gudang juga di jaga oleh petugas dan pihak keamanan, namun masih ada peluang kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, tentunya dapat mengganggu nilai-nilai demokrasi di daerah sintang Kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan di antaranya: pencoblosan di malam hari, politik uang, pencoblosan berulang-ulang, penggabungan kotak surat suara. Kemudian untuk memperjelas permasalahan tersebut maka penulis mengutip dari, Jawa Post Group Online, Senin 21/6 2010 dengan judul, "Pemungutan suara ulang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sintang".

Penyelesaian perkara yang terjadi dalam pemilihan umum di Kabupaten Sintang, dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, namun selanjutnya KPU Sintang juga harus melakukan rekapitulasi perolehan suara ulang di 97 TPS di enam Kecamatan (Tempunak, sungai Teblan, Dedai, Ketungau Tengah, Ketungau Hulu dan Ketungau Hilir) berdasarkan formulir C1 KWK. Perkara yang terjadi di Kabupaten Sintang, maka keluarlah keputusan MK terjadinya pelanggaran serius, sistimatis, terstruktur dan masif diempat Kecamatan tersebut. MK menunjukkan bahwa

Rekap Perolehan Suara di PPK tidak bersesuaian dengan rekap KPPS pada 181 TPS. Seharusnya terdapat perbedaan rekapitulasi tersebut, seketika itu penyelenggaraan pemilu melakukan pembetulan. Perkara yang terjadi di empat desa tepatnya di sebelas tempat pemilihan suara yang ada di Kecamatan Sungai Teblian, empat desa tersebut ialah: (1). Desa Merarai dua. (2). Desa Mantir. (3). Desa Bonet Lama. (4). Desa Rarai.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sintang yang dilakukan secara langsung, seharusnya mampu menciptakan demokrasi seperti yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan dan dengan pemilihan yang dilakukan di daerah harus memiliki kualitas yang baik juga sanggup mencerminkan sebuah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baik, menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pemilu yang dilakukan oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, maka agar pemilihan umum langsung dapat terlaksana dengan tertip, tepat waktu, mampu mewujudkan keinginan dan cita-cita kita bersama, oleh sebab itu masalah pilkada ulang tahun 2010, menjadi amat penting untuk kita ketahui bersama. Berdasarkan kondisi demikian penulis tertarik meneliti mengenai permasalahan yang terjadi pada saat pilkada di Kabupaten Sintang yaitu tentang pelaksanaan penghitungan suara ulang pilkada Tahun 2010 di Kabupaten Sintang. dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah Kabupaten Sintang tahun 2010.

2. Ruang Lingkup Masalah

Fokus dan arah permasalahan yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mekanisme pelaksanaan penghitungan suara ulang PilKaDa Tahun 2010 di Kabupaten Sintang, dengan aspek penelitian sebagai berikut: Pelaksanaan penghitungan suara ulang, Prosedur pelaksanaan penghitungan suara ulang dan Pedoman dan prinsip pelaksanaan penghitungan suara ulang.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penghitungan suara ulang PilKaDa Tahun 2010 di Kabupaten Sintang meliputi : Anggaran, Sarana prasarana dan Koordinasi dan pengawasan.

3. Perumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah : Mengapa terjadinya Proses Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang PilKaDa Tahun 2010 di Kabupaten Sintang dan bagaimana KPU melaksanakannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Agustino (2009:140) mengatakan, berdasarkan pengalaman pada pemilu 1999 dan 2004 memberikan contoh betapa persoalan teknis seperti distribusi logistik, aturan kampanye, pencoblosan dan penghitungan suara menjadi ajang konflik diantara peserta pemilu yang berujung pada sengketa yang berlarut-larut. Hal ini harus menjadi pelajaran oleh semua pihak, terutama yang berkompeten terhadap regulasi pilkada langsung. Abdullah (2009:227) pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri, dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas baik. Dilaksanakan oleh tim koordinasi yang diketuai oleh sekretaris daerah Kabupaten/kota yang anggotanya terdiri dari unsure/instansi/lembaga terkait di Kabupaten/kota. Huntington dalam Muhaimin dan Macandrews (1991:61) banyak studi tentang Negara-negara baru telah mengabaikan pertumbuhan lembaga-lembaga politik dan sebaliknya telah memusatkan perhatiannya pada perubahan-perubahan dalam masyarakat. Professor Huntington mengkritik tendensi ini, sebab perubahan sosial yang pesat dapat merusak pembangunan politik. Jackson (1978:395) jelas bahwa iklim masyarakat sipil meningkat, tetapi apakah partai politik yang lahir pada masa transisi demokrasi Indonesia memiliki agenda demokratisasi dan reformasi? Rezim militer memang tidak ada lagi tetapi paradigma pemerintahan sipil masih belum terlihat di Indonesia

walaupun semangat profesionalisme militer sudah meningkat. Justru militerisasi sipil menampilkan gejala yang cukup meningkat dan konflik kepentingan tidak di akhiri pada akomodasi, tetapi pada kekerasan politik yang aktornya berubah dari aparat militer menjadi aparat militer sipil. Suryono A (2006:8). Dalam kegiatan politik sebuah keputusan di dasarkan kepada besarnya suara yang dibawa. Para pemimpin Negara, para anggota parlemen, Gubernur, Bupati/walikota dan kepala desa ditentukan berdasarkan perolehan dukungan dari rakyat. Demikian juga berbagai fasilitas yang akan dibangun tergantung pada partai yang memenangkan suara dalam pemilihan umum.

Ahli sosiologi sekaligus Direktur Pusat Pengkajian Indonesia Timur (PPIT) atau *Center For East Indonesian Affairs* (CEIA), Ignas Kleden menyatakan bahwa bahaya dari golput dan apatisme masyarakat adalah langengnya status guo dan jatuhnya kepemimpinan Negara kepada orang yang salah. Menurut Ignas, kalau parpol yang ada sekarang ini jelek atau tidak memenuhi harapan, maka untuk mengubahnya hanya mungkin bisa dilakukan dengan memberikan suara pada pemilu mendatang. Sebab, hanya dengan memberikan suara memungkinkan terjadinya proses perekrutan elite politik yang baru. Sebaliknya, kalau menyimpan suara bearti memberikan kesempatan suara pada elite politik lama tetap bertahan. Siapapun mereka yang tidak memberikan suara pada pemilu mendatang, sesungguhnya justru membenarkan status guo politik sekarang ini. Dengan begitu, apatisme masyarakat miliki implikasi yang buruk bagi masyarakat maupun pemerintahannya. Alienasi politik yang dirasakan oleh masyarakat juga merupakan dampak dari latarbelakang sosial ekonomi. Kesenjangan tajam antara kelas sosial dimasyarakat memunculkan pandangan oportunistis terhadap politik sebagai alat pencaharian ekonomi.

"The alienation of the worker in his product means not only that his labour becomes an object, an external existence, but that it exists outside him, independently, as something alien to him, and that it becomes a power of itsown confronting him" (Marx, 1975:108).

Dalam kutipan tersebut Marx menjelaskan bahwa kegiatan para pekerja dalam hasil produksinya bukan hanya tenaga kerjanya telah menjadi objek, sebuah eksistensi lain yang berada diluar dirinya dan secara terpisah terasing darinya dan menjadi kekuatan yang berkonfrontasi dengannya. Gambaran mengenai kegiatan para pekerja dalam proses produksi ini dapat dianalogikan dalam kegiatan politik dengan mengambil kegiatan dalam politik sebagai hasil kerja sosial dan masyarakat sebagai objek pekerja yang menghasilkan produksi. Produksi sosial dari masyarakat adalah negara karena negara merupakan produksi sosial dari komitmen dan konsensus politik masyarakat sebagai organisasi politik tertinggi yang mengatur kehidupan sosial untuk kesejahteraan bersama.

Rolip, (2013:17) Dalam pentas pemilihan umum, masyarakat juga mengaku bahwa mereka lelah mendengar janji para politisi yang tidak kunjung ada buktinya. Mereka tetap memilih para politisi seperti sekedar memenuhi kewajiban menjadi warga negar yang ikut serta dalam pemilihan umum. Kasus money politik yang selalu membayangi pemilihan umun ditanggapi dingin oleh masyarakat, masyarakat beranggapan bahwa dalam even pesta demokrasi tersebut mereka hanya mengambil keuntungan dari para politisi yang berhasrat untuk menjadi penguasa. Masyarakat menerima sogokan money politics dari para calon namun ketika pemilihan berlangsung masyarakat memilih sesuai kehendaknya. Perilaku pemilih tanpa tanggung jawab yang dilakukan masyarakat merupakan bentuk apatisme masyarakat yang laten dan berbahaya karena akan mendorong pada semua dampak buruk apatisme politik.

Penyelesaian masalah yang terjadi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang, harus sejalan dengan hal-hal sebagai berikut, yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 01 Tahun 2009. Pada penetapan yang kelima berbunyi: (1). Penyelesaian gugatan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sintang terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang mengenai hasil oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Keberatan terhadap hasil Penghitungan Suara yang di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang. (2). Penyelesaian

sengketa Hukum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut penulis dengan memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 01 Tahun 2009. Maka Komisi Pemilihan Umum sebagai pelaksana pemilihan umum di Kabupaten Sintang hendaknya berpedoman dengan Keputusan ini, agar dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang nampaklah kerja nyata dari Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang independen. Kemudian penulispun menangkap sebuah niat baik yang dilakukan oleh pasangan calon bupati yang selalu siap menerima apapun hasil akhir dalam penghitungan nanti, apakah menguntungkan pihak calon yang mengugat ataupun pihak calon yang tergugat, dengan demikian maka penulis menarik sebuah intisari baik atau itikat baik dari para calon yang sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya, walaupun pada kenyataannya masih ada riak-riak kecil di tengah masyarakat .

Latif dalam Toni (2009:7) adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara. Dalam hal pemilihan secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah atau *public policy*, kebijakan ini mencakup tindakan-tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan. Artinya hal yang paling utama dalam kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah partisipasi rakyat sangat dibutuhkan, karna berhasilnya pelaksanaan politik yang menuju demokrasi murni adalah dimana rakyat menjadi peran utama dalam setiap kegiatan pelaksanaan pemilihan umum. Surbakti dalam Toni (2009:15) membedakan partisipasi menjadi beberapa katagori, pertama apatis artinya orang-orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik, kedua spectator artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum, ketiga gladiator artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye termasuk aktivis masyarakat. Muller dalam Toni (2009:16) partisipasi politik dapat juga dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yakni individual dan kolektif. Maksudnya seorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah maupun kolektif. Yang di maksud partisipasi secara kolektif adalah kegiatan warga Negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum.

Prihatmoko, (2005:281) Sistem Penghitungan Suara yang baik adalah yang di dalamnya mengadakan Mekanisme Kontrol dan Solusi jika muncul persoalan dengan hasil Penghitungan, hal itu terpenuhi dengan adanya Mekanisme Penghitungan Suara. Sebagaimana Elemen-elemen Penghitungan Suara Ulang bertujuan mendapatkan hasil yang valid dan reliabel. Mustofa S, (2005:117). Penghitungan Ulang Surat Suara di Tempat Pemilihan Suara (TPS), di lakukan apa bila dari hasil Penelitian dan Pemeriksaan di lapangan yang di lakukan secara tepat, cepat dan akurat namun juga dalam pelaksanaannya yang mampu membuktikan kebenaran Permasalahan karena dengan kebenaran akan menciptakan demokrasi yang sebenarnya yang terjadi dan mampu memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Penghitungan Suara di lakukan secara tertutup,
2. Penghitungan Suara yang di lakukan kurang Penerangan cahaya,
3. Saksi Pasangan Calon, Panwas, Pemantau Pemilu dan Warga Masyarakat tidak dapat menyaksikan Proses Penghitungan Suara Secara jelas,
4. Penghitungan Suara di lakukan di tempat lain, di luar tempat dan waktu yang telah di tentukan, dan/atau
5. Terjadi Inkonsistensi dalam penentuan surat suara yang sah dan yang tidak sah.

Pada saat terjadinya Permasalahan dalam Pemilu KaDa maka para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhak menyampaikan keberatan hasil Pemilu KaDa oleh Pasangan Calon Kepala Daerah ke MK, paling lambat 3 hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih. Namun Penghitungan Suara dan Pemungutan Suara Ulang di Putuskan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang di lakukan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sesudah hari Pemungutan Suara. Proses dan Keputusan Mahkamah Konstitusi pada saat

terjadinya sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal Penghitungan Suara, maka dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009. Dengan demikian maka di sediakan Waktu selama 14 (empat belas) hari setelah di Daftarkan di Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang menyampaikan Penetapan Pasangan Calon dan hasil Putusan paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima Putusan dari Mahkamah Konstitusi yang di laksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang. Artinya Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang yang sepenuhnya di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang harus menunggu Keputusan yang jelas dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan apa bila MK telah mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Penghitungan maka KPUD harus melaksanakan sesuai dengan Keputusan tersebut kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang harus membuat Tahapan pelaksanaan penghitungan suara ulang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang di gunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Sintang. Subjek penelitian adalah yang berhubungan langsung dengan masalah Penghitungan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepatnya di Kecamatan Sungai Teblian Kabupaten Sintang. Diantaranya Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, Kepala Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Teblian, pertama penulis menghubungi Sekretaris Kecamatan Sungai Teblian merangkap sebagai Sekretariat PPK dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Teblian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan alat berupa foto kamera, alat perekam, dan pedoman wawancara. Teknik analisis data bersifat kualitatif yang sesuai dengan tujuannya, untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki.

HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Mekanisme Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Tahun 2010 Di Kabupaten Sintang

1. Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang

Pelaksanaan penghitungan suara ulang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tetap mengacu pada amar putusan Mahkamah Konstitusi. Namun menurut keterangan yang penulis dapatkan bahwa, terjadinya perbedaan rekap data di panitia pemilihan kecamatan tidak bersesuaian dengan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada 181 tempat pemilihan suara, menurut Kepala subbagian teknis dan hubungan partisipasi masyarakat perbedaan rekap data di panitia pemilihan kecamatan dengan di kelompok penyelenggara pemungutan suara dapat dilihat pada putusan sela Mahkamah Konstitusi. Setelah perintah MK dilaksanakan, diketahui bahwa data di KPPS yang diserahkan KPU Kabupaten Sintang kepada Mahkamah Konstitusi untuk dijadikan barang bukti. Pelaksanaan penghitungan suara yang dihitung ulang menurut Kasubag teknik pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat yang benar adalah berdasarkan putusan sela Mahkamah Konstitusi No.25/PHPU.D-VIII/2010. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa MKRI. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010. Mengalami permasalahan, kemudian penulis melakukan penelusuran permasalahan tersebut dari akar persoalan sampai kepokok permasalahan selanjutnya penulis menemukan sumber dari persoalan tersebut diatas, dengan demikian penulis mencoba untuk menceritakan dan mendiskripsikan persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010. Yang terjadi di wilayah Kecamatan Sungai Teblian Kabupaten Sintang, pertama-tama yang penulis datangi adalah Sekretaris Kecamatan Sungai Teblian dan beliau banyak bercerita tentang perbedaan itu terjadi, yaitu pada saat mengikuti pelaksanaan penghitungan suara ulang di KPU beliau mengatakan yang terjadi hanya pembacaan ulang berita acara yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan tidak ada Pembukaan Kotak Suara seperti yang diperintahkan oleh Mahkamah

Konstitusi. Namun menurut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang yang dalam penjelasan tersebut diserahkan sepenuhnya pada bagian Teknik Pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat, beliau hanya memberikan Dokumen Putusan sela Mahkamah Konstitusi No. 25/PHPU.D-VIII/2010.

Hasil wawancara menyatakan bahwa, hubungan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perintah dari MK tidak dilakukan seperti yang diperintahkan, namun yang terjadi adalah pembacaan rekap yang dikirim di Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Pemilihan Umum dan bukan rekap yang dijadikan barang bukti, itu artinya tidak ada perubahan yang berarti, namun Komisi Pemilihan Umum malah mensinyalir telah terjadi pemalsuan terhadap surat C1-KWK yang dijadikan barang bukti di Mahkamah Konstitusi. Partisipasi masyarakat pelaksanaan penghitungan suara ulang Pilkada Tahun 2010. Tetap dilakukan bertempat di aula Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, lihat surat laporan ke MK tentang pelaksanaan penghitungan suara ulang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang terlampir. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang No. 171/KPU-STG/VII/2010. Tentang, Laporan Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang berdasarkan Rekapitulasi Formulir Model C1-KWK.

Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang di aula Sekretariat berjalan tidak seperti diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya kegiatan yang dilakukan adalah membuka kotak surat suara yang telah dikunci dan ada saat rapat berlangsung dibuka dan dihitung kembali namun acara rapat pleno tersebut diarahkan oleh pemimpin rapat pleno bukan pada tujuan yang diperintahkan oleh Mahkamah maka Mahkamah berhak untuk membatalkan semua hasil akhir dari rapat tersebut dan menyatakan diskualifikasi atau tidak ada penghitungan ulang lagi. Sehingga putusan Mahkamah adalah menetapkan pasangan nomor urut (2) untuk gugur dari Pencalonan dan tidak berhak mengikuti Pemilihan Umum yang dilaksanakan dan menetapkan pasangan calon nomor urut (4) menjadi Kepala Daerah Kabupaten Sintang.

Untuk memperkuat pendapat penulis maka bersama ini akan dilampirkan Dokumen Resmi yang dijadikan barang bukti Mahkamah Konstitusi sekaligus agar dapat dipahami. Sebelum penulis melampirkan dokumen ada baiknya penulis mencoba mendeskripsikan secara sederhana, dalam berkas tersebut sebenarnya calon pasangan nomor urut (4) menemukan titik buntu tentang penyelesaian perkara maka dengan membentuk Tim, mereka mencoba mencari keadilan karena di Kabupaten Sintang tempat pelaksanaan Pemilu berlangsung tidak ada lagi lembaga yang dapat dipercaya termasuk Lembaga Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang. Maka berlanjutlah perkara tersebut sampai ke Mahkamah Konstitusi, kemudian keluarlah Keputusan MK No. 25/PHPU.D-VIII/2010.

Keputusan MK tentang Perselisihan Perkara Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, maka secara konseptual memberi perintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang untuk melaksanakan Pemilu Ulang di beberapa Daerah dan Penghitungan Ulang, dalam pelaksanaan penghitungan KPU menyediakan Aula Sekretariatnya untuk tempat pelaksanaan, bahkan kotak dan anak gembokpun telah disiapkan namun yang terjadi bukan KPU menghitung ulang malah mereka melaksanakan perbandingan Formulir Model C1-KWK dan ini tidak sesuai dengan perintah Mahkamah kemudian saksi pasangan calon nomor (4) merasa keberatan, namun tidak dianulir oleh KPU.

Dokumen yang menjadi pegangan Mahkamah Konstitusi yang dianggap palsu oleh KPU Kabupaten Sintang, Panwaslu dan pasangan calon nomor urut (2). Ini hanya lampiran kecil dari sebuah keputusan yang salah, dalam lampiran C1-KWK Desa Merarai tepatnya pada TPS 937 dan hasil keputusan rapat. Adalah hal yang tidak benar karena dalam amar putusan tersebut antara perintah dan yang dilakukan di lapangan sangat jauh bertentangan dan tidak sejalan yaitu menurut berkas bukti di MK bahwasanya suara yang ada pada pasangan calon nomor urut (2) adalah ditambahkan dengan suara yang didapat dari pasangan calon nomor urut 1 dan 3 sedangkan pasangan calon dengan nomor urut (4) tetap sebagai pemenang di setiap TPS. namun penambahan suara yang dilakukan oleh PPK, Panwaslu dan KPU Kabupaten Sintang pada

penambahan suara yang sangat patal yaitu pada 97 TPS dengan 6 Kecamatan, artinya cukup besar suara yang dimanifulasi oleh ketiga Lembaga Pemilukada tersebut.

2. Prosedur Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang

Teknik Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat sebagai prosedur Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang tetap mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Sintang Nomor 88 Tahun 2010, tertanggal 30 Juni 2010. Tentang, Mekanisme dan tata tertib Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Kabupaten Sintang. Bentuk prosedur pelaksanaan penghitungan suara ulang dan dengan insidentil yang terjadi dimasyarakat atas kebenaran mengenai adanya pengaduan dan indikasi adanya kesalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan penghitungan suara ulang, rapat pleno yang digelar oleh KPU Kabupaten Sintang dimana prosedur pelaksanaan penghitungan suara ulang yang dilakukan untuk menilai pekerjaan apakah telah sesuai dengan aturan.

3. Pedoman dan Prinsip Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang

Prinsip pelaksanaan perhitungan ulang Pemilihan Umum Kabupaten Sintang pada prinsipnya KPU Kabupaten Sintang tetap berpegang pada Pedoman yang dikeluarkan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi No.25/PHPU.D-VIII/2010 tentang, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 pada tanggal 21 Juni 2010 dan juga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang No. 88 Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang, Mekanisme dan Tata tertib Rapat Pleno terbuka Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di KPU Kabupaten Sintang. Pedoman dan prinsip pelaksanaan penghitungan suara ulang dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2010 di Kabupaten Sintang yang dilaksanakan diaula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang juga berpedoman pada Putusan KPU Kabupaten Sintang No. 171/KPU-STG/VII/2010 tentang, Laporan pelaksanaan penghitungan suara ulang berdasarkan rekapitulasi Formulir Model C1-KWK. Pedoman dan prinsip pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana yang tertulis diatas adalah: (1). Mengetahui jalannya kegiatan apakah lancar atau tidak, (2). Memperbaiki kesalahan dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang. Prinsip pelaksanaan penghitungan suara ulang dalam Pemilukada Tahun 2010 di Kabupaten Sintang adalah untuk mengetahui apakah penyusunan program kerja, penyelenggaraan administrasi keuangan telah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memberikan saran perbaikan atas kekurangan atau kelemahan, juga apakah pelaksanaan program kerja telah sesuai dengan standar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun pada kenyataannya setelah melihat dan mendengar tentang kegiatan yang dilakukan dilapangan yang diketahui ada beberapa hal dalam pelaksanaan kegiatan rapat Pleno yang dilaksanakan oleh Forum (KPU, Panwaslukada, saksi pasangan calon, utusan dari Kepolisian, pemantau Pemilukada), di aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang. Pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan tidak seperti yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi namun yang di lakukan hanya membandingkan keabsahan barang bukti yang dikirim oleh Mahkamah Konstitusi dengan Formulir C1-KWK yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Sintang dan membacakan ulang berita acara yang lama namun Forum tidak melakukan penghitungan ulang surat suara yang diperintahkan dan kotak suara dan anak kunci yang telah dipersiapkan di depan forum tidak di hitung ulang namun hanya dibacakan berita acaranya, dan saksi pasangan calon nomor urut empat tidak menerima hasil akhir dari rapat pleno tersebut.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Tahun 2010 Di Kabupaten Sintang

1. Anggaran

Anggaran merupakan salah satu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian kegiatan pelaksanaan penghitungan suara ulang Pilkada Tahun 2010 Kabupaten Sintang, agar tercipta kinerja yang baik maka KPU harus mempunyai kreteria tertentu dari Auditor yang

diperlukan untuk merencanakan audit, mengidentifikasi kebutuhan profesional, mengembangkan teknik dan metodologi audit agar sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Diketahui bahwa anggaran Kecamatan hanya menerima tambahan satu bulan gaji, dengan rincian sebagai berikut: untuk Ketua PPK Kecamatan Sungai Teblian menerima Rp. 1000.000-, (satu juta rupiah), Anggota PPK Kecamatan Sungai Teblian sebanyak 5 orang termasuk Sekretaris PPK Kecamatan Sungai Teblian menerima insentif sebesar Rp. 750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pada bagian Kesekretariatan berjumlah 4 orang masing-masing mendapatkan insentif sebesar Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah). Masalah pembagian keuangan yang tidak transparan antara Ketua panitia pemilihan Kecamatan dengan Kepala bagian Kesekretariatan panitia pemilihan Kecamatan Sungai Teblian, karena menurut ketua panitia pemilihan kecamatan pada porsi pembagian pekerjaan yang tidak adil. karena setiap pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan selalu di berikan pada ketua, namun giliran masalah keuangan tidak mau terbuka. Bahkan mengenai berapa besar pengeluaran dan pendapatan dari panitia pemilihan Kecamatan tidak pernah di ketahui oleh Ketua panitia pemilihan Kecamatan Sungai Teblian, menurut penulis dengan melihat beberapa kejadian dan setiap permasalahan dan bahan penelitian yang penulis butuhkan yang seharusnya Kesekretariatan panitia pemilihan Kecamatan Sungai Teblian selalu mengeluh tentang tidak memiliki Arsip dan kata beliau seluruh arsip telah di serahkan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang. Arsip atau dokumen yang penulis dapatkan hanya ada pada Ketua panitia pemilihan Kecamatan dan berada dalam Dokumen pribadi dan tidak ada di Kantor Sekretariat panitia pemilihan Kecamatan Sungai Teblian, dengan alasan karna tidak memiliki Sekretariat khusus dan masih menumpang di Kantor Kecamatan Sungai Teblian dan Ketua Kesekretariatan panitia pemilihan Kecamatan Sungai Teblian adalah Seorang Sekretaris Kecamatan Sehingga perbedaan beban kerja sangat di pengaruhi oleh jabatan seseorang dan yang diangkat sebagai Ketua adalah seorang guru Sekolah Dasar.

Selanjutnya diketahui bahwa pelaksanaan penghitungan suara ulang Pilkada Tahun 2010 Kabupaten Sintang memerlukan anggaran yang memadai. Anggaran yang memadai sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan penghitungan suara ulang, tanpa anggaran yang cukup mustahil keberhasilan dapat dicapai. Hal ini dirasakan oleh KPU Kabupaten Sintang karena tenaga-tenaga teknis masih sangat minim, sedangkan Unit-unit kerja jumlahnya sangat banyak yang merupakan kewajiban dari Komisi Pemilihan Umum untuk mengauditnya. Sumberdaya finansial (anggaran) sangat mempengaruhi pelaksanaan penghitungan suara ulang, karena dengan dana yang terbatas pelaksanaan penghitungan suara ulang tidak dapat berjalan secara maksimal. Panwaslu sebagai lembaga pengawas ditingkat Kabupaten dituntut untuk bekerja secara maksimal sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pengawasan. Sementara ini ketersediaan dana masih sangat terbatas karena kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang sangat banyak termasuk pelaksanaan Pemilukada ulang di beberapa Kecamatan sehingga sangat banyak dana yang diperlukan, menurut Kasubag Teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat bahwa jumlah keseluruhan kegiatan termasuk Pemilukada ulang dan penghitungan suara ulang yang dilakukan di beberapa Kecamatan berjumlah Rp. 2.811.582.882,- namun dengan jumlah dana yang demikian adanya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang beserta dengan Unit-unit Kerja yang berada dibawahnya sudah bekerja secara maksimal.

2. Sarana Prasarana

Diketahui bahwa dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ulang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Sintang Tahun 2010, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang menyediakan ruangan Aula Sekretariatnya juga menyediakan perlengkapan untuk keperluan rapat pleno yaitu menyediakan kotak suara TPS-TPS terkait yang dilakukan rekapitulasi suara ulang juga menyediakan anak kuncinya, kemudian yang paling penting adalah menyediakan segala perlengkapan untuk pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ulang Tahun 2010 Kabupaten Sintang. Akan tetapi sebagai lembaga yang dipercaya untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan penghitungan suara ulang Pilkada Tahun 2010 adalah sesuatu yang lazim, dimana sarana dan prasarana yang ada dan telah ditetapkan harus dipergunakan semaksimal mungkin oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sintang. Sarana prasarana yang telah ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dibuat untuk menjamin keberhasilan kegiatan dan Komisi Pemilihan Umum harus mempedomani dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang Pilkada Tahun 2010 Kabupaten Sintang. Karena kalau tidak akan sulit untuk mempertanggung jawabkan apabila dibelakang hari timbul persoalan dan permasalahan yang dapat mengagu kepercayaan rakyat terhadap KPU Kabupaten Sintang.

3. Koordinasi dan Pengawasan

Pelaksanaan rapat pleno berjalan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi namun yang terjadi malah sebaliknya sehingga penulis merasa yakin tentu dalam rapat tersebut saksi pasangan calon tetap melakukan protes dengan tidak menandatangani berita acara yang di buat dalam rapat pleno tersebut artinya netralitas dan kemurnian para peserta rapat memang dalam masalah besar dan perlu di pertanyakan kemurnian hasilnya. Secara fakta yang terjadi dalam rapat pleno yang dilaksanakan di aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang memang terlihat ada Koordinasi yang baik hanya untuk menjaga keamanan dan tidak pada pencapaian hasil yang diharapkan oleh semua pihak yang berselisih, seharusnya Komisi Pemilihan Umum Sebagai Lembaga yang di beri kepercayaan harus mampu memberikan kepercayaan dari hasil yang sesuai dengan keinginan bersama dan tidak menimbulkan Polemik baru dan tidak menafsirkan secara sendiri demi kepentingan golongannya. Ukuran keberhasilan pelaksanaan penghitungan suara ulang Pilkada Tahun 2010 Kabupaten Sintang bukan dari banyaknya temuan yang didapat pada saat pelaksanaan, tetapi lebih pada bagaimana Instansi Teknis (Dinas terkait) untuk memberikan/menyampaikan tindak lanjut atas temuan yang ada. Artinya keberhasilan lebih dilihat pada bentuk kerjasama yang baik dari semua pihak dan hasil akhir yang tidak memihak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penghitungan suara ulang Pilkada Tahun 2010 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang membagi Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Tahun 2010 menjadi dua tahap. pertama, tahap penghitungan perolehan suara pemungutan suara ulang. Yang Kedua, tahap penghitungan perolehan suara secara keseluruhan. Namun untuk pelaksanaan pengitungan suara ulang (rekapitulasi ulang) KPU Kabupaten Sintang, melakukan dengan dua pelaksanaan pertama, pelaksanaan Rapat Pleno terbuka penghitungan suara ulang dengan berdasarkan Rekapitulasi Formulir Model C1-KWK. Yang kedua, setelah melakukan seluruh rangkaian kegiatan yang pertama KPU Kabupaten Sintang melakukan tindak lanjut dari temuan yang ada dalam Rapat Pleno tentang, adanya indikasi pemalsuan Formulir Model C1-KWK.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Sintang, antara lain: Sumber daya manusia, Ancaman Keamanan, Keadaan Interpensi dari orang-orang yang berkepentingan, kekurangan dana. Masih minimnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tehnis dilapangan akan sangat mempengaruhi pelaksaian penghitungan suara ulang, sedangkan sumberdaya keuangan merupakan faktor penentu dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang Pilkada Tahun 2010 dengan dana yang terbatas akan mempengaruhi Kwantitas dan Kualitas kegiatan Pelaksanaan penghitungan suara ulang Pilkada Tahun 2010 Kabupaten Sintang, sementara yang takkalah pentingnya adalah ancaman keamanan yang akan mengagalkan kegiatan tersebut adalah sangat mengganggu jalannya kegiatan dan terwujudnya Pemilukada yang jujur, adil dan demokratis. Koordinasi dengan pihak terkait tentang penetapan dan pengambilan keputusan tentang palsu atau tidaknya Formulir Model C1-KWK sebaiknya pihak Komisi Pemilihan Umum bekerja sama dengan pihak Kepolisian setempat karena hal tersebut berkaitan dengan tindakan kejahatan yang sangat

membahayakan selanjutnya minta pendapat para ahli tentang Telematika baik yang berhubungan dengan Logo KPU dan Logo Pemda agar jelas.

B. Saran-saran

1. Untuk pelaksanaan penghitungan suara ulang Pilkada Tahun 2010 Kabupaten Sintang harus mengacu pada panduan Mekanisme dan Tata tertib rapat pleno terbuka pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di KPU Kabupaten Sintang.
2. Untuk hal penentuan palsu atau tidaknya Formulir Model C1-KWK sebaiknya KPU Kabupaten Sintang meminta pendapat pihak yang berkompeten dengan permasalahan tersebut.
3. Untuk mewujudkan kesan yang baik bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang hendaknya mengedepan tidak memihak dan Netralitas sebagai perwujudan nyata dilapangan, agar tidak timbul penafsiran yang beragam ditengah pelaksanaan penghitungan suara ulang Pilkada Tahun 2010 Kabupaten Sintang.
4. Karena Waktu yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi cukup banyak yaitu 60 hari. hendaknya KPU Kabupaten Sintang benar-benar menggunakan waktu tersebut untuk memenuhi harapan pasangan calon yang bersengketa yaitu dengan menghitung ulang surat suara yang disediakan dalam rapat pleno tersebut, dan jangan ada beragam penafsiran tentang keputusan MKRI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, R 2009. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*, Jakarta: Rajawali Perss
- Adi, 2004. *Study Dokumentasi*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Agustino, L 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Singgarimbun, 1989. *Analisis Data*. Yogyakarta: UII Pres.
- Mustofa S, 2005. *Pilkada Langsung. Sebuah Demokrasi Lokal*. Komisi Pemilihan Umum Daerah KSB-Nusa Tenggara Barat.
- Muhaimin dan Macandrews, 1991. *Masalah-masalah Pembangunan Politik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Prihatmoko Joko J, 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar Celeban Timur UH III/548.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabet.
- Supardi, 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Penerbit: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI). Jl. Cik Di Tiro I. Yogyakarta 55223.
- Toni, 2009. *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sintang*. Pontianak : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
- Jackson, Karl D, 1978. *The Prospect of The Beaucratic Polity in Indonesia*. Dalam Karl D jackson and Lucian. pye (ed). *Political power and communication in indonesia*. Los Angeles-London: University of california Press.
- Suryono A 2006. *Ekonomi Politik Pembangunan Dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial*. Penerbit: Universitas Negeri Malang (UM PRESS). IKIP Malang.

Web Site :

- Group, Jawa Pos, 2010. *Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sintang. (Pemilu Kalbar)*. Di akses dari: (<http://www.jawaposgrouponline.com>). 21/5.2010.
- Post Pontianak, 2010. *2 TPS di Paoh Desa Coblos Ulang lagi*. Face book dari: (<http://www.pontianakpost.com>). Senin, Juli 19 2010).
- Ignas Kleden, 2013. *Gejala Apatisme Politik Menguat..* Kompas cetak (<http://www.kompas.co.id>). 0312/11/nasional/735463.htm.
- Saptamaji R, 2013. *Apatisme Politik masyarakat di Indonesia*. (<http://www.equator-new.com>). 03/01/2013.

Peraturan dan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007.Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2009.Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010. Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 pada tanggal 21 Juni 2010.

Keputusan KPU Kabupaten Sintang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010. Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010.

Keputusan KPU Kabupaten Sintang Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010.Tatacara dan Teknis Pendistribusian Surat Suara Beserta Perlengkapan untuk keperluan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010.

Keputusan KPU Kabupaten Sintang Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2010. Mekanisme dan Tata Tertib Rapat Pleno terbuka pelaksanaan Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 sesuai Putusan MKRI di KPU Kabupaten Sintang.

Keputusan KPU Kabupaten Sintang Republik Indonesia Nomor 171/KPU-STG/VII/2010. Laporan Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang berdasarkan Rekapitulasi Formulir Model C1-KWK.

